

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/379486884>

EKONOMI INDONESIA; TEORI DAN REALITA

Book · April 2024

CITATIONS

0

READS

395

12 authors, including:



[Shinta Laura Dewani](#)

Universitas Terbuka

6 PUBLICATIONS 4 CITATIONS

SEE PROFILE



[Muhammad Isbad Addainuri](#)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

8 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

EKONOMI INDONESIA

TEORI REALITA



Editor: Muhammad Isbad Addainuri, M.E

Shinta Laura Dewani • Nuriatul Fatimah • Muhammad
Diaz Supandi • Samsiar • Alamsyah Agit • Lina Wati •
Lestari Etika Suci • Muhammad Noor • Mayogi Araffi •
Arini Izzati • Madinatul Munawwarah

EKONOMI INDONESIA; TEORI DAN REALITA

**Shinta Laura Dewani, Nuriatul Fatimah,
Muhammad Diaz Supandi, Samsiar, Alamsyah Agit,
Lina Wati, Lestari Etika Suci, Muhammad Noor,
Mayogi Araffi, Arini Izzati, Madinatul Munawwarah**

**Editor :
Muhammad Isbad Addainuri, M.E**



EKONOMI INDONESIA; TEORI DAN REALITA

Edisi Pertama

Copyright @ 2024

ISBN: 978-623-09-9552-1

14 x 21 cm

viii + 184 hlm.

Cetakan ke-1, Maret 2024

Penulis:

Shinta Laura Dewani, Nuriatul Fatimah, Muhammad Diaz Supandi,
Samsiar, Alamsyah Agit, Lina Wati, Lestari Etika Suci,
Muhammad Noor, Mayogi Araffi, Arini Izzati,
Madinatul Munawwarah.

Editor:

Muhammad Isbad Addainuri, M.E

Desain & Layout:

M. Mansyur

PENERBIT:

ALIFBA MEDIA

Jl. Lawangan Daya No. 06, Pademawu, Pamekasan

Email: mediaalifba@gmail.com

Website: www.alifba.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mereproduksi,
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul “Ekonomi Indonesia; Teori dan Realita” ini merupakan karya hasil kolaborasi antar penulis yang bertujuan menggali teori dan praktek ekonomi khususnya di Indonesia. Selain itu, buku ini dimaksudkan untuk menyajikan analisis kritis terhadap praktek-praktek ekonomi yang ada.

Dalam setiap bab, buku ini membahas berbagai aspek ekonomi Indonesia yang bervariasi dalam prakteknya sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga kami berharap dari adanya buku ini mampu membuka paradigma tentang hubungan antara teori dan realita ekonomi.

Buku ini menjadi buah pemikiran atas kajian yang mendalam terhadap isu-isu yang terkini terkait Ekonomi di Indonesia. Kami berharap buku ini mampu memberikan inspirasi, wawasan baru, dan pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi di Indonesia, agar kita selaku masyarakat Indonesia ikut andil dalam membantu mengimplementasikan teori serta dalam memecahkan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Terlebih lagi, kami berharap tulisan-tulisan kami dapat menjadi pijakan bagi pembaca untuk bertindak mewujudkan aspek ekonomi yang baik agar Indonesia kedepan semakin baik, berkembang, dan menjadi negara yang siap bersaing dengan negara-negara lain dalam sektor ekonomi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, serta kepada para pembaca yang telah memberikan perhatian dan dukungan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
CHAPTER I TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL YANG BERKELANJUTAN	1
<i>Shinta Laura Dewani</i>	
PENDAHULUAN	1
PEMBAHASAN	2
A. Latar Belakang Ekonomi Digital	2
B. Konsep Ekonomi Digital	6
C. Perubahan Paradigma Ekonomi Menuju Digital	10
D. Keberlanjutan Sebagai Landasan Utama Transformasi	13
E. Studi Kasus: Transformasi Ekonomi Digital Berkelanjutan di Indonesia	18
PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA	21
CHAPTER II TRAJEKTORI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM DINAMIKA TANTANGAN EKONOMI POLITIK GLOBAL	25
<i>Nuriatul Fatimah</i>	
PENDAHULUAN	25
PENDAHULUAN	28
A. Kedaulatan Negara dan Tantangan Globalisasi	28
B. Dinamika Ekonomi Politik Global	31
C. Turbulensi Sistem Ekonomi Kerakyatan	34
D. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketercerabutan Ekonomi	36
PENUTUP	38
DAFTAR PUSTAKA	40

**CHAPTER III GLOBALISASI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP EKONOMI INDONESIA.....41**

Muhammad Diaz Supandi

PENDAHULUAN.....	41
PEMBAHASAN	42
A. Konsep dan Teori Globalisasi Ekonomi.....	42
B. Implikasi Globalisasi terhadap Perekonomian Indonesia.....	45
C. Kebijakan dan Strategi Ekonomi Menghadapi Globalisasi.....	47
PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

**CHAPTER IV KEKUATAN EKONOMI INDONESIA
DITENGAH RESESI PEREKONOMIAN GLOBAL56**

Samsiar

PENDAHULUAN.....	56
PEMBAHASAN	59
A. Konsep Ekonomi Indonesia ditengah Resesi Perekonomian Global.....	59
B. Dampak Resesi Perekonomian Global di Indonesia..	61
C. Upaya UMKM dalam Menghadapi Resesi Perekonomian Global di Indonesia	63
PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

**CHAPTER V TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN:
PENTINGNYA PERAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
DALAM MENCAPAI DAYA SAING EKONOMI70**

Alamsyah Agit

PENDAHULUAN.....	70
PEMBAHASAN	74
A. Peran Pendidikan Dalam Penciptaan Daya Saing Ekonomi.....	74

B. Peran Teknologi Dalam Penciptaan Daya Saing Ekonomi.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	83
CHAPTER VI DISPARITAS EKONOMI MASYARAKAT DESA DAN KOTA.....	86
<i>Lina Wati</i>	
PENDAHULUAN.....	86
PEMBAHASAN.....	87
A. gambaran Perekonomian Desa.....	87
B. gambaran Perekonomian Kota.....	95
C. Disparitas Ekonomi Masyarakat Desa dan Kota.....	99
PENUTUP.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
CHAPTER VII PERILAKU INVESTOR DALAM PASAR MODAL.....	103
<i>Lestari Etika Suci</i>	
PENDAHULUAN.....	103
PEMBAHASAN.....	106
A. <i>Behaviour finance</i>	106
B. Perilaku Investor.....	107
C. Bias Pengambilan Keputusan Investor.....	109
PENUTUP.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
CHAPTER VIII SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA.....	118
<i>Muhammad Noor</i>	
PENDAHULUAN.....	118
PEMBAHASAN.....	120
A. Gambaran Kemiskinan di Indonesia.....	120
B. Gambaran Sistem-Sistem Ekonomi Dunia.....	121

C. Konsep Distribusi Pendapatan dalam Sistem Ekonomi Islam	126
PENUTUP	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
CHAPTER IX PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA	133
<i>Mayogi Araffi</i>	
PENDAHULUAN	133
PEMBAHASAN	135
A. Perkembangan Perbankan Pra-Kemerdekaan Indonesia.....	135
B. Perkembangan Perbankan Setelah Kemerdekaan Indonesia.....	136
C. Awal Mula Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	137
D. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia pada Masa Sekarang.....	140
PENUTUP.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
CHAPTER X WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI	147
<i>Arini Izzati</i>	
PENDAHULUAN	147
PEMBAHASAN	149
A. Wakaf Produktif	149
B. Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi	152
PENUTUP.....	157
DAFTAR PUSTAKA.....	159
CHAPTER XI FINTECH (PERSPEKTIF FIKIH EKONOMI DAN BISNIS ISLAM)	161
<i>Madinatul Munawwarah</i>	

PENDAHULUAN	161
PEMBAHASAN	163
A. Financial Technology (FINTECH)	163
B. Pengertian Fintech Secara Umum dan Syariah	165
C. Fintech dalam Pandangan Ulama Fiqh	166
D. Fintech Menurut Fatwa DSN –MUI.....	168
E. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	168
F. Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad.....	172
G. Konsep Fintech dalam Bisnis Islam	174
H. Konsep fintech dalam Perspektif Fikih Ekonomi	175
PENUTUP.....	176
DAFTAR PUSTAKA.....	177
BIOGRAFI PENULIS.....	179

CHAPTER I

TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL YANG BERKELANJUTAN

Shinta Laura Dewani

PENDAHULUAN

Semenjak memasuki dunia serba digital, tak pernah bisa kita imajinasikan dunia tanpa menggunakan teknologi dan internet. Mari bayangkan, berapa imbalan yang anda mau untuk hidup dalam kurun waktu tertentu tanpa menggunakan teknologi digital sama sekali? Bahkan mungkin berapapun banyaknya kompensasi yang diterima akan tetap membuat anda berpikir kembali mengenai mampukah kita merasakan mundurnya zaman dengan kehilangan akses pada kecanggihan ini. Hal ini sangat amat wajar semenjak banyak sekali jaminan kemudahan dan pesona modernisasi yang ditawarkan untuk kita manusia di zaman serba digital dengan teknologi mutakhir. Tak hanya teknologi yang berubah, kita juga berubah. Inilah yang mengantar kita menuju gerbang transformasi terutama yang erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, sebagai kegiatan utama kita dalam kehidupan.

Transformasi ekonomi digital telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan mengakses informasi. Revolusi digital ini menciptakan perubahan dalam struktur ekonomi global, mengubah cara perusahaan beroperasi dan memberikan

dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Transformasi ekonomi digital ini bukan sekadar tren sementara, tetapi evolusi yang mendalam dan berkelanjutan yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita.

Pada bab ini, kita akan mengulas tentang latar belakang, konsep, perubahan paradigma, keberlanjutan sebagai dasar transformasi, dan juga studi kasus mengenai transformasi ekonomi digital di negeri ini. Pada pembahasan ini akan diidentifikasi strategi dan kebijakan yang dapat diadopsi untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari transformasi yang terus berlangsung.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Ekonomi Digital

Ekonomi digital berawal dari perkembangan teknologi digital yang pesat. Penemuan internet di 1970an, hingga maraknya *platform e-commerce* dan pembayaran online di 1990an dan 2000an menjadi penanda penting. Revolusi digital ini terus berlanjut hingga saat ini dengan kehadiran *smartphone* dan kecerdasan buatan, yang pada akhirnya mengubah cara kita berbelanja, berkomunikasi, dan mengakses informasi.

Latar belakang dari transformasi ekonomi digital dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama yang muncul dan berkembang seiring waktu. Berikut adalah beberapa poin kunci yang menjelaskan latar belakang dari fenomena ini.

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, komputasi awan (*cloud computing*), *big data*, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), telah menjadi katalisator utama untuk transformasi ekonomi digital. Kemajuan ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat, pengolahan data yang lebih efisien, dan pengembangan solusi teknologi yang inovatif. Pada akhirnya, kemajuan teknologi digital berdampak positif terhadap kinerja ekonomi dan lingkungan (Li et al., 2020).

2. Globalisasi

Proses globalisasi telah mempercepat interkoneksi antara pasar, perusahaan, dan individu di seluruh dunia. Ekonomi digital memungkinkan akses global terhadap pasar, memfasilitasi perdagangan internasional, dan menciptakan peluang baru untuk kolaborasi antarnegara. Melalui globalisasi, teknologi digital berkembang pesat dan mulai terintegrasi ke dalam setiap aspek kehidupan kita di seluruh dunia (Sepashvili, 2020).

3. Perubahan Pola Konsumsi

Perubahan dalam perilaku konsumen, yang semakin beralih ke *platform* digital untuk berbelanja, berkomunikasi, dan mengakses informasi, telah mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan transformasi ini. Statista Market Insights memprediksi bahwa pengguna *e-commerce* di Indonesia akan terus meningkat. Pada tahun 2022, terdapat 178,94 juta pengguna, meningkat 12,79% dari tahun 2021.

Diperkirakan pada tahun 2027, pengguna *e-commerce* akan mencapai 244,67 juta. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ini adalah kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi yang ditawarkan oleh layanan online (Ridhwan, 2023).



Gambar 1. Proyeksi Jumlah Pengguna E-Commerce di Indonesia

Sumber: Data Indonesia (2023)

4. Inovasi Bisnis dan Model Baru

Perusahaan yang mampu mengadopsi model bisnis digital atau menciptakan inovasi baru dengan menggunakan teknologi telah muncul sebagai pemimpin dalam ekonomi digital. Perusahaan rintisan (*startups*) sering kali muncul dengan pendekatan yang inovatif dan digital. Selain itu, transformasi digital telah mempengaruhi cara perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai di hampir semua industri. Dampak ini mendorong penggunaan berbagai model bisnis baru, seperti inovasi hemat biaya (*frugal innovation*) dan ekonomi sirkular (memperpanjang umur produk, bahan baku, dan sumber daya lainnya) (Vaska et al., 2021).

5. Dukungan Regulasi

Sejumlah negara dan pemerintahan telah mengadopsi kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Inisiatif ini mencakup investasi dalam infrastruktur digital, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan regulasi yang mengakui tantangan dan peluang yang muncul dalam lingkungan ekonomi digital. Dukungan ini semakin mendorong transformasi dan sangat diperlukan karena di masa kini, teknologi digital menjadi pusat dari berbagai kegiatan ekonomi masyarakat termasuk pembentukan kebijakan sosial dan penyampaian layanan (Henman, 2022).

6. Keinginan untuk Efisiensi dan Produktivitas

Bisnis dan pemerintah di seluruh dunia mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Ekonomi digital menawarkan solusi dalam bentuk otomatisasi proses, analisis data yang canggih, dan *platform* kolaboratif yang menjadi penggerak penting pertumbuhan produktivitas dan optimalisasi struktural ekonomi (G20 Group, 2016).

7. Perubahan Kultur Organisasi

Organisasi yang berhasil dalam transformasi ekonomi digital sering kali mengalami perubahan budaya yang mendukung inovasi, fleksibilitas, dan tanggung jawab terhadap perubahan cepat dalam lingkungan bisnis. Penting bagi organisasi untuk mengadopsi pendekatan yang reflektif terhadap perubahan, mengakui kompleksitasnya, dan melibatkan

seluruh anggota organisasi dalam proses perubahan (Alvesson & Sveningsson, 2015).

Faktor - faktor di atas menjadi latar belakang dan katalis dari proses transformasi ekonomi menjadi ekonomi digital. Dengan adanya faktor-faktor ini, transformasi ekonomi digital menjadi semakin penting dan luas sebagai respons terhadap perubahan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia bisnis, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Konsep Ekonomi Digital

Ekonomi digital, sebuah fenomena ekonomi baru, berakar dari kecerdasan terhubung jaringan yang muncul sejak tahun 1990-an (Tapscott, 2014). Ekonomi digital adalah konsep yang mencakup aktivitas ekonomi yang dilakukan secara online melalui penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkait. BEA (*Bureau of Economic Analysis*) mendefinisikan ekonomi digital dengan memfokuskan pada infrastruktur internet dan TIK serta transaksi digital (*e-commerce*) dan konten digital yang dihasilkan dan diakses oleh pengguna (Barefoot et al., 2018).

Penulis mendefinisikan bahwa ekonomi digital merupakan sebuah sistem ekonomi yang didorong oleh teknologi digital, di mana berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan keuangan dilakukan secara *online*. Zaman ini ditandai dengan konektivitas internet yang semakin luas, penggunaan perangkat digital yang masif, dan munculnya berbagai *platform online* yang mengubah cara kita berbisnis dan bertransaksi.

Karakteristik utama ekonomi digital adalah konektivitas, digitalisasi, *platform online*, data, dan teknologi. Dari segi konektivitas, Internet menjadi tulang punggung ekonomi digital, memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi secara *real-time*. Digitalisasi memuat berbagai proses dan aktivitas ekonomi diubah ke dalam format digital, seperti *e-commerce*, *e-banking*, dan *e-government*. Kemudian mengenai *platform online*, seperti *marketplace*, media sosial, dan aplikasi *mobile*, saat ini telah menjadi perantara utama dalam berbagai aktivitas ekonomi. Data menjadi aset berharga yang digunakan untuk memahami konsumen, mengembangkan produk dan layanan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Teknologi digital seperti *AI*, *big data*, dan *blockchain* berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam ekonomi digital.

Ekonomi digital membawa banyak *manfaat*, seperti:

1. Efisiensi

Teknologi digital membantu mengotomatisasi proses dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Contohnya, penggunaan *e-commerce* memungkinkan bisnis untuk menjual produk mereka secara online dengan biaya yang lebih rendah dan jangkauan pasar yang lebih luas.

2. Akses

Ekonomi digital membuka akses ke pasar yang lebih luas bagi bisnis dan konsumen. Contohnya, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat memanfaatkan *platform e-commerce* untuk menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan dunia.

3. Inovasi

Ekonomi digital mendorong inovasi produk, layanan, dan model bisnis baru. Contohnya, munculnya layanan transportasi *online* seperti Gojek dan Grab yang memberikan solusi mobilitas yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat.

4. Kesempatan

Ekonomi digital menciptakan peluang baru untuk lapangan kerja dan entrepreneurship. Contohnya, banyak orang yang memulai bisnis *online* mereka sendiri melalui *platform e-commerce* dan media sosial.

5. Kesejahteraan

Ekonomi digital dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses yang lebih mudah ke layanan keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, layanan *e-banking* memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan aman dari mana saja.

Namun, ekonomi digital juga menghadirkan beberapa *tantangan* seperti berikut ini:

1. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke internet dan teknologi digital. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial.
2. Kurangnya keterampilan digital dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Misalnya, banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor teknologi digital.
3. Ancaman siber dan penipuan *online* menjadi risiko yang perlu dihadapi dalam ekonomi digital. Contohnya,

kebocoran data pribadi dan penipuan *online* dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi bisnis dan konsumen.

4. Regulasi yang ada mungkin belum cukup adaptif untuk mengikuti perkembangan teknologi digital. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.
5. Penggunaan teknologi digital perlu diiringi dengan etika dan tanggung jawab untuk menghindari dampak negatif. Contohnya, penggunaan *AI* dan *big data* perlu dilakukan dengan memperhatikan privasi dan keamanan data pribadi.

Untuk mencapai potensi penuhnya, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, bisnis, maupun masyarakat untuk membangun ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur digital yang memadai, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital.

Bisnis perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan mengembangkan model bisnis baru yang inovatif. Masyarakat perlu meningkatkan keterampilan digital dan menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Ini semua karena ekonomi digital membawa sejumlah peluang, namun juga tantangan dan aturan main baru dalam pasar global (Lazović & Duričković, 2014).

C. Perubahan Paradigma Ekonomi Menuju Digital

Era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, mengubah cara kita memahami, menjalankan, dan berinteraksi dalam ranah ekonomi. Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang cara berpikir dan berbisnis. Paradigma baru ini menekankan pada inovasi, fleksibilitas, dan konektivitas global. Ekonomi digital bukan hanya tentang efisiensi statis, melainkan tentang dinamika dan perubahan. Lebih dari sekadar meningkatkan produktivitas, ekonomi digital lebih fokus pada penciptaan kegiatan dan produk baru. Yang benar-benar baru dalam ekonomi digital adalah penyebaran penggunaan internet, yang memungkinkan tingkat dan bentuk konektivitas baru antara berbagai ide dan pelaku, melahirkan berbagai kombinasi baru secara luas.

Ekonomi digital telah menghasilkan perubahan besar dalam cara berbisnis. Beberapa perubahan paradigma yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari *Offline* ke *Online*

Ekonomi digital merevolusi cara berbisnis dengan menjangkau pelanggan melalui platform online seperti *e-commerce*, media sosial, dan *website*. Penelitian menunjukkan Internet mengubah perilaku pembelian, memberikan keuntungan jangkauan pasar luas, biaya operasional rendah, dan kemudahan bagi pelanggan. Bisnis yang tidak memanfaatkan teknologi digital akan tertinggal dalam persaingan (Díaz et al., 2017).

2. Dari Transaksi Fisik ke Digital

Dahulu kita mungkin hanya mengenal transaksi langsung antara penjual dan pembeli, namun era digital

mengubah cara transaksi kita dengan dompet digital, pembayaran melalui aplikasi seluler, dan teknologi tanpa sentuhan yang populer. Transformasi ini memberikan kenyamanan bagi pelanggan dan membuka peluang baru untuk pengembangan layanan keuangan dan bisnis secara keseluruhan. (Alkhowaiter, 2020)

3. Dari Skala Lokal ke Global

Globalisasi dan teknologi informasi mengubah cara bisnis beroperasi. Dulu terbatas pada wilayah lokal, kini dengan platform *e-commerce* global seperti Amazon dan Alibaba, bisnis dapat menjangkau pasar global dengan mudah. Ini membuka peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan memberikan akses ke sumber daya global. Bisnis yang memanfaatkan teknologi dan *platform e-commerce* global memiliki kesempatan besar untuk berkembang dan berhasil secara global. (Gillespie & Swan, 2021)

4. Dari Aset Fisik ke Aset Digital

Ekonomi digital mengubah fokus aset bisnis dari fisik ke digital seperti data pelanggan, *platform online*, dan konten digital. Aset digital memiliki keunggulan biaya rendah, skalabilitas, dan nilai tahan lama. Data pelanggan membantu pengembangan produk, platform online meningkatkan *brand awareness*, dan konten digital membangun hubungan dengan pelanggan. Transformasi digital membuka peluang baru bagi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan nilai jangka panjang dengan berinvestasi dalam aset digital. (Kenney & Zysman, 2016)

5. Dari Fokus Produk ke Fokus Pelanggan

Ekonomi digital menekankan pengalaman pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang, seperti memberikan pengalaman belanja online terbaik di platform perusahaan (Wilson et al., 2016). Ini kunci untuk mencapai kesuksesan dengan membangun loyalitas pelanggan dan keuntungan berkelanjutan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan responsif dan membangun komunitas online untuk interaksi. Program loyalitas juga menarik pelanggan setia dan menghasilkan keuntungan jangka panjang.

6. Dari Model Bisnis Tradisional ke Model Bisnis Baru

Ekonomi digital merevolusi bisnis melalui *platform online*, *marketplace*, *sharing economy*, dan layanan berlangganan, menciptakan nilai inovatif dan peluang baru. Ini menguntungkan bisnis dengan perluasan pasar dan efisiensi, serta memberi pelanggan lebih banyak pilihan, kemudahan bertransaksi, dan harga yang kompetitif. Model bisnis digital menjadi kerangka baru untuk menciptakan nilai tambahan sesuai tuntutan zaman. (El Hilali & El Manouar, 2020)

7. Dari Hierarki ke Kolaborasi

Di era digital, kolaborasi antar bisnis dan organisasi menjadi kunci untuk menciptakan nilai bersama. Misalnya, Gojek membantu UMKM memasarkan produk *online*, Tokopedia menjangkau pelanggan lebih luas bagi *brand* lokal, dan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam mengembangkan infrastruktur digital. Kolaborasi

meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong inovasi. (Steiber & Alänge, 2021)

8. Dasar Pengambilan Keputusan: Dari Data ke *Artificial Intelligence (AI)*

Di era digital, data menjadi aset berharga dan *AI* membantu bisnis menganalisisnya dengan cerdas. Pengambilan keputusan berbasis *AI* menghasilkan keuntungan seperti keputusan yang lebih akurat, peningkatan efisiensi, dan pengembangan produk dan layanan baru. Contohnya, Netflix merekomendasikan film berdasarkan kebiasaan menonton, Amazon memprediksi produk yang mungkin dibeli, dan Google Maps memprediksi waktu tempuh. Perlu diingat, kecerdasan buatan (*AI*) dapat melengkapi kemampuan kognitif manusia saat menghadapi kompleksitas. Sementara itu, manusia tetap dapat memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dan intuitif dalam menghadapi ketidakpastian serta keambiguan dalam pengambilan keputusan organisasi. Konsep ini mencerminkan ide augmentasi kecerdasan, yang menekankan bahwa sistem *AI* sebaiknya dirancang dengan niat untuk memperkuat peran manusia, bukan menggantikannya (Jarrahi, 2018).

D. Keberlanjutan Sebagai Landasan Utama Transformasi

Ekonomi digital telah mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, hal ini telah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang cepat, meningkatkan standar hidup masyarakat, meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan memperkuat

perlindungan lingkungan (Song et al., 2022). Transformasi ekonomi digital yang berkelanjutan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan sosial dan ekonomi yang luas. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, diperlukan kombinasi berbagai faktor kunci yang saling terkait dan saling mendukung antara lain:

1. Infrastruktur Digital

Saat ini, infrastruktur digital mendukung berbagai bisnis inovatif seperti *sharing economy*, media sosial, layanan informasi *mobile*, ritel elektronik, dan media yang didukung oleh iklan (Greenstein, 2019). Konektivitas internet yang luas dan stabil, ketersediaan perangkat digital yang terjangkau, dan peningkatan keterampilan digital masyarakat menjadi pondasi utama ekonomi digital. Perluasan infrastruktur internet ke daerah pedesaan dan terpencil, program edukasi digital untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, dan subsidi atau program pembiayaan untuk perangkat digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan digital.

2. Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan mendorong perkembangan ekonomi digital. Regulasi yang ramah bisnis, insentif fiskal untuk mendorong inovasi, dan program-program untuk meningkatkan daya saing UMKM dapat menjadi langkah awal. Keamanan siber dan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama dalam ekonomi digital. Regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi dan transaksi *online*, serta edukasi bagi

konsumen untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan siber, perlu diberlakukan. Perlu diingat bahwa dalam peralihan ke ekonomi digital, pengaruhnya tidak hanya tergantung pada peralatan teknis dan tingkat otomatisasi awal negara, melainkan juga pada kesediaan masyarakat untuk menerima perubahan, kebijakan domestik dan luar negeri negara, implementasi program sosial, dan faktor subjektif dalam hubungan internasional (Horoshko et al., 2021).

3. Inovasi dan Kewirausahaan

Inovasi teknologi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi digital, seperti *AI*, *big data*, dan *blockchain*. Inkubasi bisnis dan *startup*, transfer teknologi dari negara maju, dan program pendanaan untuk UMKM dapat membantu mendorong kewirausahaan dan lahirnya ide-ide inovatif dalam ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi digital diharapkan melahirkan generasi baru pengusaha dan meningkatkan investasi dalam ekonomi (Hamid & Khalid, 2016).

4. Kerjasama dan Kemitraan

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk membangun infrastruktur digital, mengembangkan kebijakan yang mendukung, dan mendorong inovasi. Kolaborasi antar pelaku usaha juga tak kalah penting. Kemitraan global dan berbagi pengetahuan antar negara dapat membantu mempercepat transformasi ekonomi digital dan

meningkatkan manfaatnya bagi semua orang. Kolaborasi pengetahuan dengan mitra eksternal memberikan manfaat bagi perusahaan besar dan usaha kecil dan menengah (UKM). Kolaborasi ini menghasilkan hasil yang lebih tinggi bagi UKM, khususnya dalam hal peningkatan inovasi. Kolaborasi dengan pesaing internasional membantu meningkatkan inovasi di UKM (Audretsch et al., 2023).

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pendidikan dan pelatihan digital untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, penciptaan peluang kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital, dan akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan ekonomi digital seperti *e-commerce*, *e-banking*, dan *e-government* menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat dan memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam era digital. Dengan pemberdayaan yang baik terutama di era ekonomi digital, akan tercipta pertumbuhan inklusif bagi masyarakat (Ahmed, 2019).

6. Kepemilikan Aset Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Aset digital, terutama data pelanggan dan hak kekayaan intelektual, menjadi salah satu fokus utama ekonomi digital (Ciuriak, 2021) Perlindungan hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta menciptakan lingkungan aman bagi pemilik dan mendorong inovasi. Keberlanjutan ekonomi digital bergantung pada kemampuan merancang dan menjaga

kerahasiaan aset digital ini. Perlindungan hak kekayaan intelektual bukan hanya pelindung bagi pencipta dan pemilik, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan yang mendukungnya menjadi kunci dalam menggalang potensi ekonomi digital yang berkembang pesat.

7. Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Perubahan signifikan terjadi dalam kepercayaan masyarakat karena digantikannya sistem sosial tradisional oleh teknologi digital (Sannikova & Kharitonova, 2019). Kepercayaan masyarakat adalah kunci keberlanjutan ekonomi digital. Transparansi data, etika bisnis, dan keamanan informasi penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan konsumen. Keterlibatan aktif konsumen, pendidikan mengenai keamanan digital, dan dukungan regulasi efektif merupakan langkah kunci. Kesadaran masyarakat terhadap manfaat teknologi digital, dipadu dengan menjaga integritas dan keamanannya, menjadi faktor penentu untuk mencapai ekonomi digital yang berkelanjutan, di mana kepercayaan masyarakat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Transformasi ekonomi digital yang berkelanjutan membutuhkan komitmen dan upaya jangka panjang dari semua pihak. Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci di atas dan bekerja sama secara kolektif, kita dapat membangun ekonomi digital yang inklusif, tangguh, dan bermanfaat bagi semua orang.

E. Studi Kasus: Transformasi Ekonomi Digital Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia, negara kepulauan dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk transformasi digital melalui berbagai inisiatif dan program yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Digital

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk memperkuat sistem *e-government*, meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Salah satu contohnya adalah portal Satu Data Indonesia, yang mengintegrasikan data pemerintah dan meningkatkan akses publik. Selain itu, berbagai layanan publik seperti e-KTP, e-Samsat, dan e-Taxation telah diluncurkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi.

2. Pemberdayaan UMKM

UMKM telah menjadi “tulang punggung” ekonomi Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB (Cantika, 2023). Untuk mendorong transformasi digital UMKM, pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti program “Digitalisasi UMKM” yang menyediakan pelatihan dan bantuan pembuatan *website*. Selain itu, berbagai *platform e-commerce* dan *marketplace* lokal seperti Tokopedia, Shopee, dan

Bukalapak telah berkembang pesat, membantu UMKM memasarkan produk mereka secara online.

3. Infrastruktur Digital

Pemerintah Indonesia terus memperluas infrastruktur digital, termasuk akses internet dan jaringan 5G, untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Contohnya, pembangunan Palapa Ring, jaringan tulang punggung serat optik nasional, telah meningkatkan akses internet di daerah terpencil (Palaparing.id, 2016). Selain itu, pemerintah juga mengencangkan pembangunan BTS 4G dan 5G untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan internet di seluruh wilayah Indonesia.

4. Pendidikan dan Keterampilan Digital

Meningkatkan literasi digital dan keterampilan digital masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi ekonomi digital yang berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan berbagai program edukasi dan pelatihan, seperti program "*Digital Talent Scholarship*" yang memberikan pelatihan bagi talenta digital muda. Selain itu, berbagai program pelatihan digital juga diadakan oleh lembaga swasta dan komunitas untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat.

Meskipun menunjukkan potensi besar, transformasi ekonomi digital di Indonesia masih terhambat oleh beberapa faktor. Pertama, kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah urban dan rural masih menjadi masalah, di mana akses internet dan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil masih terbatas. Kedua, kurangnya literasi digital

dan keterampilan digital masyarakat menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi digital secara optimal. Ketiga, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat untuk mengakses teknologi digital. Keempat, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi digital dan kebutuhan ekonomi digital, sehingga perlu adaptasi dan pembaharuan regulasi.

Transformasi digital Indonesia yang berpotensi besar ini memerlukan sinergi dan komitmen kuat antar pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Perluasan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital menjadi krusial. Pemerintah harus adaptif dengan memperbarui regulasi, serta mendorong inovasi dan inklusivitas agar transformasi digital ini berkelanjutan dan memberi manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUTUP

Dalam perjalanan mengeksplorasi transformasi ini, kita telah menyelidiki transformasi ekonomi digital yang sedang berlangsung, dari latar belakangnya hingga konsep dasarnya, serta perubahan paradigma yang mendasarinya. Fenomena ini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dan menuntut adaptasi yang cepat dari berbagai pihak.

Namun, tidak lupa bahwa fokus utama dalam pembahasan ini adalah konsep keberlanjutan. Keberlanjutan dalam konteks ekonomi digital bukan sekadar tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh dari segi sosial, ekonomi, dan

lingkungan. Kemudian studi kasus tentang transformasi ekonomi digital di Indonesia memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah negara berusaha mengadopsi teknologi secara berkelanjutan, sambil memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi digital tidak hanya memberikan manfaat bagi beberapa pihak saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Hanya dengan pendekatan holistik dan berkesinambungan, kita dapat memastikan bahwa transformasi ekonomi digital berjalan menuju arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, D. H. (2019). Role of Digital Economy in Realization of Inclusive Growth. *Islamic Finance and Digital World*, 54.
- Alkhowaiter, W. A. (2020). Digital payment and banking adoption research in Gulf countries: A systematic literature review. *International Journal of Information Management*, 53, 102102.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102102>
- Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2015). *Changing organizational culture: Cultural change work in progress*. Routledge.
- Audretsch, D. B., Belitski, M., Caiazza, R., & Phan, P. (2023). Collaboration strategies and SME innovation performance. *Journal of Business Research*, 164, 114018.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114018>

- Barefoot, K., Curtis, D., Jolliff, W., Nicholson, J. R., & Omohundro, R. (2018). Defining and measuring the digital economy. *US Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Washington, DC, 15*, 210.
- Cantika, Y. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Fajarharapan.Id.
- Ciuriak, D. (2021). Intellectual Property and the Digital Economy: Five Issues for International Norms and Trade Rules. *Available at SSRN 3923127*.
- Díaz, A., Gómez, M., & Molina, A. (2017). A comparison of online and offline consumer behaviour: An empirical study on a cinema shopping context. *Journal of Retailing and Consumer Services, 38*, 44–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.05.003>
- El Hilali, W., & El Manouar, A. (2020). Digital business models: Doing business in the digital era. *Innovations in Smart Cities Applications Edition 3: The Proceedings of the 4th International Conference on Smart City Applications 4*, 217–229.
- Gillespie, K., & Swan, K. S. (2021). *Global marketing*. Routledge.
- Greenstein, S. (2019). Digital infrastructure. *Economics of Infrastructure Investment () University of Chicago Press*.
- Group, G. R. (2016). G20 digital economy development and cooperation initiative. *G20 Research Group at the University of Toronto, 2009–2016*.
- Hamid, N., & Khalid, F. (2016). Entrepreneurship and innovation in the digital economy. *The Lahore Journal of Economics, 21*, 273.
- Henman, P. W. F. (2022). Digital social policy: Past, present, future. *Journal of Social Policy, 51*(3), 535–550.

- Horoshko, O.-I., Horoshko, A., Bilyuga, S., & Horoshko, V. (2021). Theoretical and methodological bases of the study of the impact of digital economy on world policy in 21 century. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120640.
- Jarrahi, M. H. (2018). Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making. *Business Horizons*, 61(4), 577–586.
- Kamalina, A. R. (2023). *Nilai Ekonomi Digital RI Nyaris Tembus Rp1.232 Triliun Tahun Ini*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com>.
- Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. *Issues in Science and Technology*, 32(3), 61.
- Kominfo. (2023). *Potensi Ekonomi Digital, Ciptakan Peluang Inovasi dan Lapangan Kerja Baru*. www.kominfo.go.id/
- Lazović, V., & Duričković, T. (2014). The digital economy in developing countries-challenges and opportunities. *2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)*, 1580–1585. <https://doi.org/10.1109/MIPRO.2014.6859817>
- Li, Y., Dai, J., & Cui, L. (2020). The impact of digital technologies on economic and environmental performance in the context of industry 4.0: A moderated mediation model. *International Journal of Production Economics*, 229, 107777. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107777>
- Mustajab, R. (2023). *Pengguna E Commerce RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta pada 2023*. <https://dataindonesia.id>
- Palaparing.id. (2016). *Pembangunan Palapa Ring Barat PT. Mora Telematika Indonesia (Moratelindo)*. <https://palaparing.id/>
- Sannikova, L. V., & Kharitonova, Y. S. (2019). The trust and the digitalization of society. *2nd International*

- Conference on Education Science and Social Development (ESSD 2019)*, 506–509.
- Sepashvili, E. (2020). Supporting digitalization: Key goal for national competitiveness in digital global economy. *Economia Aziendale Online-*, 11(2), 191–198.
- Song, M., Zheng, C., & Wang, J. (2022). The role of digital economy in China's sustainable development in a post-pandemic environment. *Journal of Enterprise Information Management*, 35(1), 58–77.
- Steiber, A., & Alänge, S. (2021). Corporate-startup collaboration: effects on large firms' business transformation. *European Journal of Innovation Management*, 24(2), 235–257.
- Tapscott, D. (n.d.). *The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* New York, NY: McGraw-Hill, 2014
Reviewed by Howard A. Doughty.
- Tapscott, D. (2014). The Digital Economy Anniversary Edition. *Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*.
- Vaska, S., Massaro, M., Bagarotto, E. M., & Dal Mas, F. (2021). The digital transformation of business model innovation: A structured literature review. *Frontiers in Psychology*, 11, 539363.
- Wilson, A., Zeithaml, V., Bitner, M. J., & Gremler, D. (2016). *EBOOK: Services Marketing: Integrating customer focus across the firm*. McGraw Hill.

CHAPTER II

TRAJEKTORI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM DINAMIKA TANTANGAN EKONOMI POLITIK GLOBAL

Nuriatul Fatimah

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem yang dibentuk berdasarkan tujuan pemenuhan pemerataan ekonomi yang bersumber pada pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, sebab negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan distribusi pemerataan ekonomi melalui regulasi hukum dan kebijakan politik.

Sila kelima dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia sesungguhnya merupakan sistem ekonomi berbasis negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan secara normatif menjalankan sistem ekonomi berdasarkan kepada pemerataan distribusi ekonomi. Dalam negara kesejahteraan, negara berperan dalam menjamin keamanan dan hak-hak ekonomi warga negaranya sebab sumber-sumber daya ekonomi diserahkan kepada negara untuk dikelola dengan tujuan kolektif guna menghasilkan kemakmuran yang adil bagi seluruh warga negara.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum dalam mengatur sistem ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, secara normatif hal tersebut merupakan manifestasi dari

bentuk negara kesejahteraan. Instrumen hukum yang menjadi manifestasi dari bentuk negara kesejahteraan adalah terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari:

1. Ayat (1), perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Ayat (3), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.
4. Ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional.
5. Ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jika merujuk pada pasal 33 beserta turunannya, secara normatif Indonesia merupakan negara dengan basis sistem ekonomi kesejahteraan. Badan-badan negara diharapkan mampu secara sinergis dalam melaksanakan fungsi ekonomi dengan merujuk pada landasan normatif tersebut. Landasan normatif telah menjadi jalur lintasan atau trajektori sistem ekonomi Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor historis terbentuk negara bangsa Indonesia yang mengalami eksploitasi sumber daya alam pada era kolonialisme yang berdampak pada kondisi persoalan kemanusiaan yang serius dalam waktu yang tidak sebentar.

Kondisi kolonialisme membentuk kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa bahwa untuk melepaskan diri dari kekerasan dan eksploitasi ekonomi sebagaimana yang terjadi pada era kolonialisme, maka bangsa Indonesia perlu memiliki tekad berupa hak untuk menentukan nasib sendiri berupa kemerdekaan dari penjajahan dengan membentuk sebuah negara yang berdaulat. Sehingga negara bangsa yang berdaulat memiliki otonomi yang absolut dalam menentukan arah kehidupan bangsa tanpa campur tangan bangsa dan negara lain.

Dalam sebuah negara bangsa, kedaulatan negara mencakup pada beberapa hal, yakni kedaulatan dalam menentukan kebijakan sosial, politik, ekonomi dan pertahanan teritorial untuk menciptakan ketahanan nasional yang bersifat kolektif. Negara memiliki hak prerogatif yang absolut dalam menentukan kebijakan sosial, politik, ekonomi dan pertahanan teritorial sehingga campur tangan negara lain atau entitas lain merupakan suatu hal yang melanggar hukum kesepakatan internasional sehingga campur tangan yang bersifat eksplisit dapat memicu sanksi internasional, misalnya ketika suatu negara melakukan agresi terhadap negara lain sehingga sanksi internasional dapat berupa kecaman hingga embargo ekonomi dan pemutusan hubungan diplomatik kepada negara yang melakukan agresi kepada negara lain.

Indonesia memiliki otonomi dalam membentuk sistem ekonomi yang merujuk pada latar belakang historis berupa kondisi kolonialisme. Sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi rujukan bagi tata kelola ekonomi sepanjang republik ini berdiri dengan tujuan pemerataan sumber-sumber daya ekonomi yang

tidak hanya diakses oleh elit semata namun dapat diakses bagi seluruh masyarakat.

PENDAHULUAN

A. Kedaulatan Negara dan Tantangan Globalisasi

Negara yang berdaulat yang memiliki otonomi dalam mengatur sistem politik, ekonomi, dan sosial nya tetap memiliki kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara swadaya oleh negara itu sendiri. Oleh karenanya, negara-negara berdaulat tetap membutuhkan peran negara lain dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Kerjasama ekonomi antar negara diwadahi dalam bentuk kerjasama perdagangan internasional yang menghasilkan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat kerjasama ekonomi yang disebut sebagai rezim perdagangan internasional yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk organisasi-organisasi perdagangan internasional.

Pada era globalisasi, batas-batas teritorial menjadi mudah untuk dinegosiasikan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan antar negara dalam menjalin kerjasama ekonomi. Sesungguhnya, globalisasi telah terjadi sejak sebelum terbentuknya negara bangsa pada era ekspansi pelayaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Eropa yang mempengaruhi perdagangan dunia. Pada era pasca terbentuknya negara bangsa, globalisasi semakin meningkat seiring dengan peningkatan penemuan di bidang teknologi sebagaimana pada era revolusi industri serta era pasca Perang Dingin. Pada era revolusi industri, produktivitas aktivitas industri semakin meningkat dengan ditemukannya mesin uap, lalu pada era pasca Perang Dingin, kondisi politik internasional yang tidak dipengaruhi oleh potensi

perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet kala itu menciptakan kondisi yang cukup kondusif karena ketegangan akibat perimbangan kekuatan di dalam struktur politik internasional telah usai.

Pada era pasca Perang Dingin, teknologi di bidang komunikasi, transportasi dan industri semakin meningkat, hal tersebut berdampak pada peningkatan kuota ekspor dan impor negara-negara. Terlebih lagi pasca Perang Dingin khususnya pada tahun 1990-an, muncul beragam organisasi-organisasi internasional diantaranya yakni AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) pada tahun 1992 dengan Indonesia sebagai salah satu pendirinya.

Globalisasi memberikan dampak berupa batas-batas teritorial yang dapat dinegosiasikan. Mobilitas barang dan jasa antar negara menjadi meningkat akibat efisiensi dibidang teknologi komunikasi, transportasi dan penunjang industri. Produksi barang-barang secara massal terjadi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat antar negara yang sesuai dengan rumusan tentang keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Perdagangan internasional dan ekspansi investasi modal internasional memiliki nilai (*value*) kebebasan meraih kesejahteraan ekonomi tanpa hambatan sehingga peran negara diharapkan untuk seminimal mungkin dalam mengatur perekonomian negara dengan regulasi pasar yang mengatur jalannya ekonomi. Perdagangan internasional yang memiliki nilai berupa tujuan kebebasan individu dalam meraih kesejahteraan tanpa campur tangan negara telah diterapkan oleh negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara. Globalisasi membawa nilai kebebasan ekonomi menuju spektrum yang lebih meluas sehingga

mempengaruhi negara-negara yang semula pada hakikatnya dan secara normatif tidak menganut sistem liberalisme ekonomi.

Akan tetapi dalam kerjasama perdagangan internasional, negara-negara perlu menyepakati ketentuan-ketentuan kerjasama. Ketentuan-ketentuan tersebut mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik tingkat domestik sebuah negara. Ketentuan-ketentuan tersebut memiliki nilai liberalisme ekonomi yakni memberikan keleluasaan seluas-luasnya bagi perusahaan atau pihak swasta dalam mengelola ekonomi dan meminimalisir peran negara dalam mengatur jalannya perekonomian negara.

Terdapat ketentuan-ketentuan umum yang perlu disepakati oleh negara-negara anggota organisasi perdagangan internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya yakni penghapusan hambatan non-tarif, penghapusan larangan kuota impor, dan larangan proteksi terhadap produk domestik. Ketentuan-ketentuan tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap ketentuan-ketentuan tersebut kepada kebijakan ekonomi domestiknya.

Penyesuaian ketentuan dari kerjasama perdagangan internasional dan investasi modal internasional menjadi sebuah persoalan jika secara nilai, konsep, dan tujuan kebijakan ekonomi berseberangan. Satu sisi kerjasama ekonomi internasional membawa nilai liberalisme ekonomi melalui kerjasama ekonomi internasional, di sisi lain terdapat negara yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional namun memiliki sistem ekonomi berbasis pemerataan kolektif bagi setiap warga negara seperti Indonesia. Negara yang sesungguhnya memiliki peran

sebagai negara dengan kebijakan berbasis negara kesejahteraan yang memiliki peran berupa menciptakan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik untuk proses distribusi pemerataan ekonomi. Bagi Indonesia, dampak dari penyesuaian ketentuan kerjasama ekonomi internasional adalah tantangan implementasi ekonomi kerakyatan sebagai pondasi sistem ekonomi Indonesia.

B. Dinamika Ekonomi Politik Global

Sebagaimana negara-negara yang mengalami kolonialisme oleh Eropa lainnya, Indonesia mendeklarasikan kedaulatan negara pasca Perang Dunia kedua usai. Setelah Perang Dunia kedua usai, sistem politik internasional mengalami dinamika susulan berupa ketegangan antar negara-negara yang berbasis perbedaan ideologi. Dampak dari sistem politik internasional yang disebabkan oleh ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bukan hanya mempengaruhi politik internasional namun juga kondisi sosial, ekonomi, dan politik domestik.

Kondisi kolonialisme memberikan dampak berupa keinginan dari pendiri republik Indonesia membentuk sistem ekonomi yang bersifat kolektif. Kolonialisme merupakan bentuk dari eksploitasi ekonomi yang berdampak pada kondisi ketertinggalan bangsa Indonesia di berbagai bidang sebab kesejahteraan sebuah bangsa menentukan kualitas pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lainnya. Oleh karenanya pemerataan ekonomi yang bersifat kolektif harapannya mampu mengatasi persoalan ketertinggalan akibat kolonialisme yang semula memiliki tujuan berupa ekspansi wilayah, eksplorasi rempah-rempah atau sumber daya alam lainnya hingga eksploitasi komoditas ekonomi dan tenaga kerja.